

Problems and Challenges of Education Quality in Indonesia: A Systematic Literature Review from an Islamic Education Perspective

Dini Nur Islami 

Megister Pendidikan Agama Islam, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Correspondence: dinurislami2@gmail.com

Article History:

Received: 26 June 2026

Accepted: 20 August 2026

Keyword:

Educational Quality;
Systematic Literature
Review;

Islamic Educational
Institutions;

Total Quality;

Management;

Educational Policy;

Abstract

The quality of education is a persistent and unresolved issue in Indonesia, particularly within Islamic educational institutions, which are burdened by structural, cultural, and resource related problems. Although a considerable body of research has examined teacher quality, access, curriculum, quality management, and digitalisation, most prior studies treat these issues in isolation and rarely integrate them into a single systemic framework from an Islamic education perspective, this gap forms the basis of the present study. This article aims to provide an in depth, systemic analysis of the problems and challenges surrounding the quality of education from both theoretical and empirical perspectives, with a focus on Islamic educational institutions. The method employed is a Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA procedure, examining primary and secondary sources comprising SINTA indexed national scientific journals, accredited national journals, reputable international journals, reports from international organisations (OECD, UNESCO), and government regulations published between 2020 and 2025, resulting in 19 eligible articles and documents after identification, screening, eligibility assessment, and quality appraisal. The findings indicate that (1) low teacher competence and uneven distribution of teachers, (2) disparities in access and infrastructure between urban areas and 3T regions, (3) a curriculum that is slow to adapt to the demands of the 21st century, (4) weak implementation of quality management at the school level, and (5) the challenge of uneven digitalisation are interrelated dimensions of a single system rather than isolated problems. In the context of Islamic education, these issues are compounded by the dichotomy of knowledge, limited integration between the pesantren/madrasah curriculum and contemporary needs, and limited institutional capacity. The novelty of this review lies in synthesising these previously dispersed strands of literature into an interconnected conceptual framework specific to Islamic education in Indonesia. This article offers recommendations to strengthen the quality of education, including the importance of a Total Quality Management (TQM) approach, the continuous enhancement of teachers' competencies, and synergy between formal and non-formal educational institutions.

© 2026 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License) 

How to Cite:

Islami, D. N. (2026). Problems and Challenges of Education Quality in Indonesia: A Systematic Literature Review from an Islamic Education Perspective. *MISOOL: Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(1), 107–120. <https://doi.org/10.47945/misool.v8i1.3094>

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia merupakan persoalan yang berulang muncul dalam setiap pergantian kebijakan, diskusi akademik, maupun laporan internasional, tanpa menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pertanyaan mengapa kualitas pendidikan Indonesia belum membaik secara signifikan bukan sekadar retorika, melainkan menyentuh akar persoalan yang kompleks dan berlapis, mulai dari faktor struktural seperti ketimpangan distribusi guru dan infrastruktur, hingga persoalan kultural yang menyangkut sikap mental dan budaya dalam komunitas pendidikan itu sendiri.

Data *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2022 yang dirilis *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menunjukkan capaian yang masih rendah. Skor literasi membaca siswa Indonesia tercatat hanya 359, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 476. Untuk matematika, Indonesia memperoleh skor 366 berbanding

rata-rata OECD 472, sementara sains berada pada angka 383 dibandingkan rata-rata OECD 485 (OECD, 2023). Kondisi ini bukan pertama kalinya Indonesia berada pada posisi tersebut; persoalan yang lebih mendasar adalah capaian tersebut belum menunjukkan peningkatan yang konsisten meskipun berbagai upaya perbaikan terus dilakukan.

Bila ditelisik lebih jauh, persoalan mutu pendidikan tidak bisa semata-mata dilihat dari angka dan peringkat. Ada dimensi yang lebih dalam yang perlu diperhatikan, yakni bagaimana pendidikan mampu membentuk manusia yang tidak hanya cakap secara kognitif, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan hidup, dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan zaman yang serba cepat. Dalam konteks pendidikan Islam, dimensi ini menjadi semakin kompleks karena pendidikan diharapkan tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membina ruh dan akhlak peserta didik. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Urgensi kajian ini semakin terasa ketika kita melihat bahwa lembaga pendidikan Islam, mulai dari madrasah, pesantren, hingga sekolah Islam terpadu turut menanggung beban yang sama dalam persoalan mutu. Bahkan, dalam beberapa hal, tantangannya lebih berat karena harus menavigasi antara tradisi keilmuan klasik dan tuntutan modernitas secara bersamaan. Diskursus tentang dikotomi ilmu agama dan umum, misalnya, masih menjadi salah satu hambatan epistemologis yang belum sepenuhnya terselesaikan di banyak lembaga pendidikan Islam.

Meskipun kajian mengenai mutu pendidikan di Indonesia telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas setiap problem secara terpisah, misalnya kajian yang berfokus pada distribusi guru (Kompasiana, 2025), kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T (Ananda et al., 2025), atau implementasi *Total Quality Management* (TQM) pada satuan pendidikan tertentu (Khasanah et al., 2023, Syawalna et al., 2023), tanpa mengaitkan temuan-temuan tersebut ke dalam satu kerangka sistemik yang utuh, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Celah penelitian (*research gap*) inilah yang mendasari kajian ini, yaitu belum tersedianya sintesis literatur yang secara eksplisit menghubungkan problem kompetensi guru, akses dan infrastruktur, kurikulum, manajemen mutu, dan digitalisasi sebagai satu sistem yang saling memengaruhi, sekaligus membaca keterkaitan tersebut dari perspektif pendidikan Islam. Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada upaya menyintesis temuan-temuan yang sebelumnya berdiri sendiri ke dalam kerangka pemahaman yang terintegrasi mengenai mutu pendidikan di Indonesia, dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengikuti prosedur PRISMA secara eksplisit dan transparan. Landasan konseptual mutu pendidikan Islam, diuraikan sejak bagian Konsep Mutu Pendidikan pada Hasil dan Pembahasan agar menjadi kerangka berpikir bagi pembahasan problem-problem berikutnya.

Kajian literatur ini disusun dengan beberapa tujuan. Pertama, memetakan problem dan tantangan mutu pendidikan secara sistematis dan analitis. Kedua, memahami problem tersebut dalam kerangka teoretis yang relevan. Ketiga, merumuskan implikasi praktis yang dapat dijadikan landasan perbaikan, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review*, kajian ini berupaya menyintesis berbagai temuan dari sumber-sumber ilmiah terkini agar menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan terpadu mengenai mutu pendidikan sebagai satu sistem yang saling berkaitan.

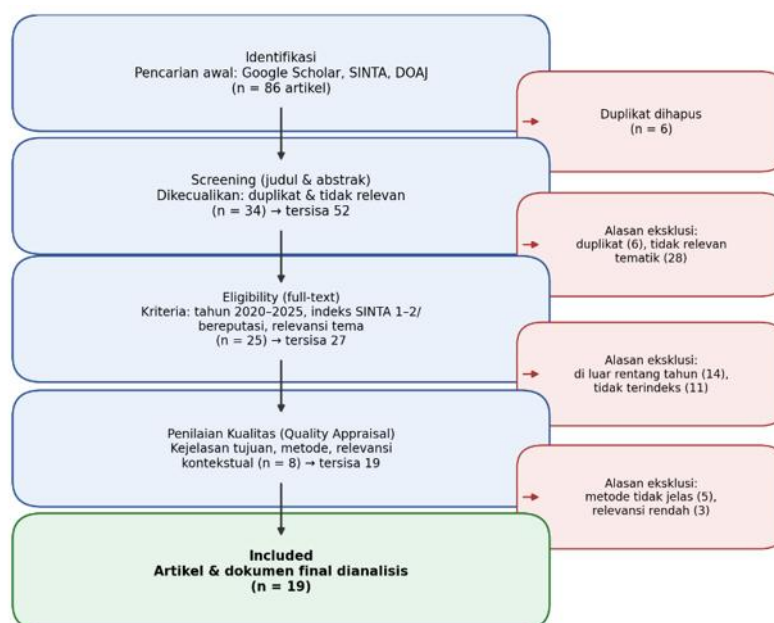
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yang secara operasional dilaksanakan melalui metode *Systematic Literature*

Review (SLR). Perlu ditegaskan bahwa SLR dalam kajian ini diposisikan sebagai metode sintesis literatur yang sistematis untuk mengoperasionalkan penelitian kepustakaan, dan bukan sebagai pendekatan penelitian yang berdiri sendiri di luar payung kualitatif. (Zed, 2014) Pemilihan metode ini dilandasi pertimbangan bahwa studi pustaka tidak boleh berhenti pada sekadar merangkum literatur secara naratif, melainkan perlu mengikuti tahapan yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga proses seleksi sumber data dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Studi pustaka dalam konteks ini melibatkan proses penelusuran sumber secara sistematis, seleksi berlapis, koding tematik, dan sintesis interpretatif terhadap berbagai temuan yang relevan dengan topik yang dikaji.

Proses SLR dalam penelitian ini mengadaptasi alur PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu identifikasi, penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*included*), ditambah satu tahap penilaian kualitas (*quality appraisal*) sebelum artikel dinyatakan final. Kelima tahap ini dijalankan secara berurutan agar artikel yang akhirnya dianalisis benar-benar relevan, kredibel, dan mutakhir. (Setyaningsri et al., 2026)

Pemilihan Google Scholar, SINTA, dan DOAJ sebagai basis data utama didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan relevansinya dengan konteks penelitian pendidikan di Indonesia, mengingat sebagian besar kajian mutu pendidikan dan pendidikan Islam di Indonesia terindeks pada basis data tersebut. Peneliti menyadari bahwa basis data internasional seperti Scopus, Web of Science, ERIC, dan Dimensions memiliki cakupan literatur yang lebih luas, keterbatasan penggunaan basis data tersebut dalam penelitian ini diakui secara eksplisit sebagai salah satu keterbatasan metodologis yang diuraikan pada bagian Kesimpulan. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dengan operator Boolean AND dan OR, misalnya (mutu pendidikan OR kualitas pendidikan) AND (pendidikan Islam OR madrasah OR pesantren), serta (total quality management AND pendidikan), dengan periode pencarian dibatasi pada rentang publikasi 2020–2025 untuk basis data utama, kecuali pada sumber teoretis rujukan utama yang tetap relevan meskipun terbit sebelum periode tersebut. (Adlini et al., 2022)



Gambar 1. Diagram Alur Prisma Seleksi Artikel

Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan pencarian awal menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di antaranya adalah mutu pendidikan, problem pendidikan Islam, total quality management pendidikan, kesenjangan akses pendidikan, kompetensi

guru Indonesia, dan digitalisasi pendidikan 3T. Pencarian ini menjangkit 86 artikel awal dari basis data Google Scholar, SINTA, dan DOAJ. Sebanyak 6 artikel yang teridentifikasi sebagai duplikat antarbasis data dihapus sebelum artikel disaring lebih lanjut pada tahap screening berdasarkan judul dan abstrak.

Pada tahap *screening*, peneliti membaca judul dan abstrak dari 80 artikel yang tersisa setelah penghapusan duplikat untuk menyaring artikel yang secara tematik tidak relevan dengan fokus kajian. Tahap ini menyisakan 52 artikel yang berpotensi relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Pada tahap *eligibility*, peneliti membaca teks penuh (*full-text*) dari 52 artikel tersebut dan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara lebih ketat. Kriteria inklusi meliputi: artikel terbit dalam rentang 2020–2025 untuk menjaga kebaruan data, terindeks SINTA 1–2, jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional bereputasi, dan memiliki keterkaitan langsung dengan tema mutu pendidikan, manajemen mutu, atau pendidikan Islam. Kriteria eksklusi meliputi artikel di luar rentang waktu tersebut, artikel non-jurnal yang tidak melalui proses tinjauan sejawat (kecuali laporan resmi lembaga) serta artikel yang temanya hanya menyinggung sepintas tanpa pembahasan substantif. Proses ini menyisakan 27 artikel yang dinyatakan layak.

Pada tahap akhir atau *included*, peneliti melakukan penilaian kualitas (*quality appraisal*) tambahan terhadap 27 artikel tersebut menggunakan tiga kriteria, yaitu kejelasan tujuan penelitian, kejelasan metode, dan relevansi kontekstual terhadap kondisi pendidikan Indonesia. Artikel yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut secara memadai ($n = 8$) dikeluarkan pada tahap ini, sehingga tahap *included* menghasilkan 19 artikel dan dokumen final yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian, terdiri dari kombinasi artikel jurnal ilmiah, buku teks manajemen mutu pendidikan, serta laporan resmi dari lembaga seperti OECD, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama RI.

Tabel 1. Alur Seleksi Artikel dengan Pendekatan Systematic Literature Review

Tahap	Aktivitas	Dikeluarkan	Alasan Utama Pengeluaran	Tersisa
Identifikasi	Pencarian Google Scholar, SINTA, & DOAJ dengan kata kunci relevan	–	–	86
Penghapusan duplikat	Penghapusan entri duplikat antarbasis data	6	Duplikasi antarbasis data	80
Screening	Penyaringan berdasarkan judul dan abstrak	28	Tidak relevan secara tematik	52
Eligibility	Pengecekan teks penuh (<i>full-text</i>)	25	Di luar rentang 2020–2025 (14); tidak terindeks SINTA/bereputasi (11)	27
Quality Appraisal	Penilaian tujuan, metode, dan relevansi kontekstual	8	Metode tidak jelas (5); relevansi kontekstual rendah (3)	19
Included	Artikel final yang dianalisis	–	–	19

Sembilan belas artikel dan dokumen yang lolos seleksi kemudian diberi kode (*coding*) untuk memudahkan proses analisis tematik. Koding dilakukan dengan mengelompokkan setiap sumber ke dalam lima kategori utama yang merepresentasikan dimensi problem mutu pendidikan yang menjadi fokus kajian ini, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skema Koding Artikel Berdasarkan Kategori Tematik

Kode	Kategori Tematik	Fokus Bahasan	Jumlah
K1	Kompetensi & Distribusi Guru	Kualifikasi, kompetensi pedagogik, dan sebaran guru	4 artikel
K2	Akses & Infrastruktur	Kesenjangan fasilitas dan konektivitas wilayah 3T	4 artikel
K3	Kurikulum & Digitalisasi	Perubahan kurikulum dan transformasi digital pendidikan	4 artikel
K4	Manajemen Mutu (TQM)	Implementasi TQM di satuan pendidikan	3 artikel
K5	Problematika Pendidikan Islam	Dikotomi ilmu, kapasitas kelembagaan, dan konsep mutu Islami	4 artikel

Catatan: total melebihi 19 karena beberapa artikel relevan dengan lebih dari satu kategori tematik

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai karakter sumber pada setiap kategori, Tabel 3 menyajikan contoh representatif artikel pada masing-masing kode tematik beserta jenis sumber dan fokus temuannya.

Tabel 3. Karakteristik Ringkas Artikel yang Direview per Kategori Tematik

Kode	Contoh Sumber (Penulis, Tahun)	Jenis Sumber	Fokus Temuan Utama
K1	Kemendikbudristek (2023), KemenagRI (2024), Chyquitita (2024)	Laporan resmi, Jurnal nasional	Kualifikasi formal & pedagogik guru belum optimal
K2	Badan Pusat Statistik (2023), Ananda et al. (2025)	Laporan resmi, Jurnal nasional	Kesenjangan fasilitas & konektivitas kota-3T
K3	Zahra (2022), Arbiyanta (2025), Yaqin et al. (2026)	Skripsi, Jurnal nasional	Perubahan kurikulum & ketimpangan digitalisasi
K4	Sallis (2002), Khasanah et al. (2023), Syawalna et al. (2023)	Buku, Jurnal internasional	Implementasi TQM & prasyarat keberhasilannya
K5	Nur et al. (2024), Ahsan (2024), Saifu (2024)	Jurnal nasional	Dikotomi ilmu & kapasitas kelembagaan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yang saling melengkapi, yaitu analisis isi (*content analysis*) dan sintesis naratif (*narrative synthesis*). *Content analysis* digunakan pada tahap awal untuk mengidentifikasi tema-tema dominan dan pola argumentasi yang muncul dari 19 artikel yang telah dikoding, menghasilkan kategorisasi temuan yang lebih sistematis. Selanjutnya, *narrative synthesis* digunakan untuk membangun narasi yang koheren dan argumentatif dari berbagai temuan yang telah dikategorikan tersebut, sehingga menghasilkan analisis yang tidak sekadar deskriptif melainkan interpretatif dan kritis.

Triangulasi sumber dilakukan secara operasional dengan membandingkan temuan yang sama dari minimal dua kategori sumber berbeda, misalnya jurnal terindeks SINTA dan laporan resmi OECD atau Kemendikbudristek, sebelum temuan tersebut disertakan sebagai dasar argumentasi dalam pembahasan. Apabila ditemukan perbedaan atau kontradiksi antarsumber, kedua sumber tersebut dicantumkan secara eksplisit beserta konteksnya masing-masing, sebagaimana tampak pada bagian Analisis Sintetis. (Adlini et al., 2022)

Penelitian ini juga menyadari adanya potensi bias dalam proses sintesis literatur, meliputi publication bias (kecenderungan studi dengan temuan positif lebih banyak dipublikasikan), selection bias (keterbatasan cakupan basis data yang digunakan), dan language bias (dominasi literatur berbahasa Indonesia dan Inggris tanpa mempertimbangkan literatur berbahasa lain). Potensi bias tersebut diminimalkan melalui triangulasi sumber, namun tetap diakui sebagai keterbatasan metodologis yang diuraikan lebih lanjut pada bagian Kesimpulan.

Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber yang berbeda kategori (jurnal SINTA, jurnal internasional, jurnal bereputasi, dan laporan lembaga resmi) untuk memverifikasi konsistensi dan keterpercayaan informasi. Selain itu, transparansi proses seleksi melalui tahapan PRISMA sebagaimana dijelaskan di atas turut memperkuat keterlacakan (*traceability*) dan dapat direplikasikannya (*replicability*) proses penelitian ini, sehingga membedakannya dari studi pustaka konvensional yang prosedur seleksinya cenderung tidak terdokumentasi secara eksplisit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan konseptual mengenai mutu pendidikan diuraikan sejak bagian ini agar menjadi kerangka berpikir bagi pembahasan problem-problem mutu pendidikan pada bagian-bagian berikutnya. Sebelum masuk ke wilayah problem dan tantangan, perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam literatur manajemen pendidikan, konsep mutu (*quality*) memiliki dimensi yang luas dan tidak tunggal. Edward Sallis, yang pemikirannya

hingga kini masih banyak dirujuk dalam kajian TQM pendidikan, mendefinisikan mutu sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan serta kebutuhan pelanggan (*customer*). (Sallis, 2002) Dalam konteks pendidikan, pelanggan yang dimaksud mencakup peserta didik, orang tua, masyarakat luas, dan dunia kerja sebuah cara pandang yang menempatkan pendidikan tidak hanya sebagai layanan administratif, tetapi sebagai investasi sosial yang harus menghasilkan nilai nyata. Sementara itu, dalam kerangka kebijakan nasional, mutu pendidikan Indonesia dioperasionalkan melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup delapan standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Kerangka normatif ini sesungguhnya cukup komprehensif, tetapi persoalannya sering kali terletak pada jarak antara regulasi dan realitas implementasi di lapangan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, mutu tidak hanya diukur dari capaian akademik dan kompetensi kognitif semata. Al-Ghazali, sebagaimana dikutip dalam berbagai kajian filsafat pendidikan Islam, memandang bahwa tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk manusia yang sempurna (*insan kamil*). Ini berarti mutu dalam pendidikan Islam bersifat menyeluruh, mencakup dimensi intelektual, spiritual, sosial, dan emosional sekaligus. (Nur et al., 2024) Perspektif ini perlu menjadi landasan dalam membaca berbagai problem mutu pendidikan yang akan dibahas berikutnya.

Problem Kompetensi dan Distribusi Guru

Guru kerap disebut sebagai faktor yang paling menentukan mutu pendidikan. Meskipun demikian, penting ditegaskan sejak awal bahwa guru bukanlah satu-satunya determinan mutu pendidikan, melainkan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang bersifat multidimensi, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Analisis Sintetis. Kualitas guru tetap berada di jantung sistem pendidikan karena menentukan bagaimana ilmu ditransfer, bagaimana karakter dibentuk, dan bagaimana potensi siswa dikembangkan, namun keberhasilannya bergantung pula pada dukungan kurikulum, manajemen, dan infrastruktur yang memadai.

Data Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 30% guru di Indonesia belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebagaimana ditetapkan undang-undang (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, n.d.) Selain masalah kualifikasi formal, ada persoalan yang lebih substansial yaitu kompetensi pedagogik yang belum memadai. Hasil Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (AKGTK) tahun 2024 yang dilaporkan Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru di madrasah belum mencapai standar optimal (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini secara langsung berpengaruh pada kualitas pembelajaran yang dialami peserta didik. Temuan Kemendikbudristek (2023) mengenai kualifikasi formal ini sejalan dengan hasil AKGTK Kementerian Agama RI (2024) yang menyoroti kompetensi pedagogik, namun keduanya menekankan aspek yang berbeda, data Kemendikbudristek lebih menonjolkan aspek kuantitatif berupa persentase kualifikasi, sedangkan AKGTK menyoroti aspek kualitatif berupa kompetensi mengajar di kelas, sehingga kedua temuan tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan problem guru secara lebih utuh.

Di sisi lain, ada persoalan distribusi yang tidak kalah pelik. Guru-guru berkualitas cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mengalami kekurangan guru yang kronis. Laporan terkini menyebutkan bahwa wilayah 3T masih kekurangan lebih dari 47.000 guru (Kompasiana, 2025) Kondisi tersebut tercermin ketika seorang guru harus mengampu beberapa mata pelajaran sekaligus karena tidak tersedia guru lain, sebuah fenomena yang tidak jarang terjadi di wilayah pelosok Indonesia.

Chyquitita dalam kajiannya tentang profesionalisme guru di era kini mengidentifikasi

beberapa tantangan utama yang dihadapi guru meliputi perubahan kurikulum yang terlalu sering, tekanan administratif yang menguras waktu dan energi, kesenjangan kompetensi digital, serta beban kerja yang tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan. (Chyquitita, 2024) Kombinasi dari berbagai tekanan ini menciptakan kondisi yang sulit bagi guru untuk berkembang secara profesional, apalagi berinovasi dalam pembelajaran.

Yang menarik dari problematika lembaga pendidikan Islam adalah temuan bahwa persoalan guru di madrasah dan pesantren memiliki lapisan tambahan, yakni ketidakjelasan status kepegawaian bagi banyak guru swasta yang mengajar di lembaga-lembaga tersebut tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai. (Rokhmiyati, 2018)

Tabel 4. Perbandingan Kondisi Guru Perkotaan dan Wilayah 3T di Indonesia

Dimensi	Perkotaan	Wilayah 3T
Kualifikasi S1/D-IV	Sebagian besar terpenuhi	Masih banyak belum terpenuhi
Rasio Guru-Siswa	Relatif ideal (1:20–30)	Sering di atas 1:40
Akses Pelatihan	Mudah dan beragam	Terbatas, sering tidak terjangkau
Fasilitas Sekolah	Memadai	Seringkali tidak layak
Akses Internet	Stabil dan luas	Tidak stabil atau tidak ada

Sumber: Diadaptasi dari berbagai kajian (Setneg, 2024; Kemendikbudristek, 2023; BPS, 2023)

Kesenjangan Akses dan Infrastruktur Pendidikan

Selain problem guru, persoalan kesenjangan akses dan infrastruktur juga sulit diselesaikan karena menyentuh dimensi geografis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan kondisi demografi yang sangat beragam menghadapi tantangan yang secara inheren berbeda dari negara-negara dengan wilayah yang lebih homogen dan terkoneksi.

Kajian Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan, terutama dalam hal kelengkapan fasilitas belajar, akses perpustakaan dan laboratorium, serta konektivitas internet. (Badan Pusat Statistik, 2023) Sementara sekolah-sekolah di kota besar sudah mulai bertransisi ke model pembelajaran berbasis teknologi, banyak sekolah di pelosok bahkan masih bergulat dengan persoalan fisik dasar seperti atap yang bocor atau ruang kelas yang tidak layak.

Kajian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Rachman (2025) tentang kesenjangan layanan pendidikan antara sekolah perkotaan dan daerah 3T menyimpulkan bahwa disparitas ini tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga berdampak pada kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. (Ananda et al., 2025) Siswa di daerah terpencil cenderung memiliki capaian yang lebih rendah, bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi karena sistem yang mendukung mereka memang belum setara.

Dalam kajiannya tentang ketimpangan akses digital di daerah 3T, Yaqin dkk. (2026) menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan yang tidak merata justru berpotensi memperlebar ketimpangan yang sudah ada. (Yaqin et al., 2026) Ketika kebijakan mewajibkan penggunaan platform digital dalam pembelajaran, sekolah-sekolah di wilayah tanpa akses internet yang stabil tidak hanya ketinggalan secara teknis, tetapi juga secara mendasar dalam proses belajar mengajar.

Kesenjangan ini turut dirasakan oleh lembaga pendidikan Islam di wilayah 3T. Banyak madrasah dan pesantren di daerah terpencil menghadapi keterbatasan sarana yang serupa dengan sekolah umum, bahkan pada sejumlah kasus lebih berat karena bergantung pada swadaya masyarakat tanpa dukungan anggaran pemerintah yang memadai. (Firman & Ni, 2023)

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kesenjangan ini bukan sekadar masalah infrastruktur teknis. Ia mencerminkan ketidakadilan sistemik yang sudah berlangsung lama dan membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar memperkuat sinyal internet atau membangun

gedung sekolah. Dibutuhkan strategi multidimensi yang menyentuh aspek kebijakan distribusi guru, pembiayaan pendidikan, pengembangan kurikulum yang kontekstual, dan pemberdayaan komunitas lokal.

Persoalan Kurikulum (Antara Perubahan dan Relevansi)

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang cukup sering mengubah kurikulumnya. Sejak era kemerdekaan, kurikulum nasional telah mengalami lebih dari sepuluh kali perubahan, dari Rentjana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum Merdeka yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak 2022. Perubahan yang terlalu sering ini, meski terkadang berangkat dari niat baik untuk memperbaiki kualitas, sering kali menimbulkan kekacauan di tingkat implementasi.

Kajian Zahra (2022) tentang pelaksanaan *hidden curriculum* di madrasah mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum yang terlalu cepat membuat guru tidak memiliki cukup waktu untuk benar-benar menguasai dan mengimplementasikan kurikulum baru secara efektif. (Zahra, 2022) Akibatnya, yang terjadi di kelas sering kali adalah implementasi setengah-setengah. Secara administratif kurikulum baru diadopsi, tetapi secara praktis cara mengajar tidak banyak berubah.

Dalam konteks pendidikan Islam, persoalan kurikulum memiliki kompleksitas tersendiri. Ada ketegangan yang sudah lama berlangsung antara kurikulum yang berorientasi pada transmisi pengetahuan keagamaan klasik dan kebutuhan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja modern. Kajian Ahsan (2024) tentang kontroversi kurikulum pesantren mengidentifikasi bahwa ketegangan ini masih belum menemukan resolusi yang memuaskan, dan banyak pesantren yang masih berjuang untuk menemukan titik keseimbangan antara mempertahankan tradisi keilmuan Islam dan merespons tuntutan modernisasi. (Ahsan, 2024)

Lebih jauh, ada persoalan relevansi yang tidak kalah mendasar. Pertanyaannya bukan hanya seberapa sering kurikulum berubah, tetapi seberapa jauh perubahan itu benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata peserta didik dan masyarakat. Kajian tentang tantangan pendidikan era modern yang dilakukan oleh Ihsan (2025) di jurnal WUNY mengidentifikasi bahwa kurikulum yang belum relevan dengan tuntutan abad ke-21 menjadi salah satu dari lima isu sentral dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. (Arbiyanta, 2025) Keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital masih belum terintegrasi secara optimal dalam banyak kurikulum yang berlaku.

Perlu dicatat bahwa literatur yang direview dalam kajian ini belum banyak menyediakan data komparatif mengenai efektivitas antarkurikulum, sehingga klaim bahwa frekuensi perubahan kurikulum secara langsung menurunkan mutu pembelajaran masih memerlukan dukungan bukti empiris lebih lanjut, dan sebaiknya dibaca sebagai kecenderungan yang teramati dalam literatur, bukan simpulan kausal yang definitif.

Lemahnya Implementasi Manajemen Mutu di Satuan Pendidikan

Total Quality Management (TQM) sebagai pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan mutu secara berkelanjutan telah banyak dikaji relevansinya dalam konteks pendidikan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh W. Edwards Deming dan kemudian diadaptasi untuk dunia pendidikan oleh Edward Sallis. Inti dari TQM dalam pendidikan adalah komitmen semua pihak dari kepala sekolah, guru, staf, bahkan orang tua untuk terus-menerus meningkatkan kualitas proses dan output pendidikan.

Kajian sistematis yang dilakukan oleh Khasanah dkk. (2023) tentang TQM dalam manajemen sekolah menemukan bahwa sekolah-sekolah yang berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip TQM secara konsisten menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas layanan pendidikan dan kepuasan seluruh pemangku kepentingan. (Khasanah et al., 2023) Namun ironisnya, banyak sekolah terutama madrasah dan sekolah swasta berskala kecil yang belum

memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menerapkan TQM secara efektif.

Persoalannya sering kali bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena minimnya pemahaman tentang cara kerja manajemen mutu dan keterbatasan sumber daya untuk mengimplementasikannya. Syawalna dkk. (2023) dalam kajiannya tentang TQM di lembaga pendidikan anak usia dini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi TQM sangat bergantung pada komitmen pimpinan, budaya organisasi yang mendukung, dan ketersediaan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. (Syawalna et al., 2023) Ketiga prasyarat ini justru sering kali menjadi titik lemah di banyak satuan pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks madrasah dan pesantren, lemahnya manajemen mutu juga berkaitan dengan tata kelola yang belum sepenuhnya profesional. Tidak sedikit lembaga pendidikan Islam yang masih mengandalkan pola kepemimpinan tunggal yang sangat bergantung pada figur kiai atau yayasan, tanpa sistem manajemen yang terstruktur dan akuntabel. Pola ini memang memiliki kekuatan dalam hal konsistensi nilai dan visi, tetapi bisa menjadi hambatan ketika lembaga perlu bertransformasi secara manajerial untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

Tabel 5. Prinsip TQM dan Relevansinya dalam Konteks Lembaga Pendidikan Islam

Prinsip TQM	Makna dalam Pendidikan	Tantangan Implementasi
Fokus pada Pelanggan	Memenuhi kebutuhan peserta didik, orang tua, dan masyarakat	Belum semua lembaga memiliki mekanisme umpan balik yang terstruktur
Perbaikan Berkelanjutan	Evaluasi dan inovasi proses pembelajaran secara rutin	Resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya
Keterlibatan Semua Pihak	Guru, staf, orang tua, dan komunitas terlibat aktif	Silo antardepartemen dan budaya hierarki yang kuat
Kepemimpinan Visioner	Kepala sekolah/kiai sebagai agen perubahan mutu	Kepemimpinan terlalu sentralistik, kurang sistemik
Berbasis Data	Pengambilan keputusan berdasar data dan bukti nyata	Keterbatasan sistem informasi manajemen pendidikan

Sumber: Diadaptasi dari Sallis (2006); Khasanah dkk. (2023); Syawalna dkk. (2023)

Tantangan Digitalisasi Pendidikan yang Tidak Merata

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 telah menjadi semacam uji coba besar-besaran terhadap kesiapan sistem pendidikan dalam menghadapi transformasi digital. Hasilnya, di Indonesia, cukup mengungkapkannya. Sekolah-sekolah di kota besar dengan infrastruktur digital yang sudah terbangun relatif mampu bertransisi ke pembelajaran daring, meski tidak tanpa tantangan. Sementara itu, sekolah-sekolah di daerah terpencil menghadapi kebuntuan nyata karena tidak ada konektivitas yang memadai.

Kajian Yakin dkk. yang tentang kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T menemukan bahwa faktor-faktor utama penyebab kesenjangan tersebut mencakup ketidakstabilan dan ketimpangan akses internet, keterbatasan perangkat digital, rendahnya kompetensi digital guru dan siswa, serta kondisi sosio-ekonomi yang tidak mendukung. (Yaqin et al., 2026) Kombinasi keempat faktor ini menciptakan lingkaran kemiskinan digital yang sulit dipecahkan tanpa intervensi sistematis dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun demikian, tidak seluruh temuan literatur bersifat normatif terhadap digitalisasi. Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa digitalisasi yang diterapkan secara tepat dan didukung infrastruktur memadai justru terbukti meningkatkan mutu pembelajaran, sebagaimana tampak pada sekolah-sekolah perkotaan yang berhasil mengintegrasikan teknologi pembelajaran secara efektif pada masa pascapandemi. Dengan demikian, persoalan pokoknya bukan terletak pada digitalisasi itu sendiri, melainkan pada kesenjangan kesiapan infrastruktur dan kompetensi digital antarwilayah yang menentukan apakah digitalisasi berperan sebagai solusi atau justru memperlebar ketimpangan. (Purnasari et al., 2024)

Yang perlu menjadi catatan penting adalah bahwa digitalisasi bukan tujuan, melainkan alat.

Ketika alat tersebut belum bisa diakses secara merata, memaksakan digitalisasi tanpa fondasi infrastruktur yang kuat justru bisa memperburuk ketimpangan yang sudah ada. Ini yang sering kali terjadi ketika kebijakan digitalisasi pendidikan dirumuskan tanpa cukup mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Dalam konteks pendidikan Islam, transformasi digital tidak hanya menghadirkan tantangan pada aspek teknis dan manajerial, tetapi juga menyentuh dimensi nilai dan budaya pendidikan. Sebagian kalangan di lingkungan pesantren masih memandang bahwa penerapan teknologi digital perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi karakteristik khas pendidikan pesantren yang selama ini dibangun melalui kedekatan hubungan antara guru dan santri serta penanaman nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, proses digitalisasi tidak dapat dimaknai sekadar sebagai penggunaan perangkat teknologi, melainkan harus diiringi dengan upaya menjaga identitas dan tradisi pendidikan Islam. Hasil kajian mengenai digitalisasi perencanaan pendidikan Islam di madrasah menunjukkan bahwa integrasi teknologi perlu dilakukan secara selektif, proporsional, dan bijaksana sehingga pemanfaatan teknologi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai dasar pendidikan Islam. (Saifu, 2024)

Problematisasi Spesifik dalam Pendidikan Islam

Pembahasan tentang mutu pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan epistemologisnya. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama pesantren dan madrasah, lahir dari tradisi keilmuan yang panjang dan kaya. Namun warisan yang kaya ini juga membawa beban tersendiri ketika dihadapkan pada tuntutan modernitas yang terus berubah.

Kajian Taufiq Nur dkk. (2024) yang membahas problematisasi lembaga pendidikan Islam sebagai tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di era milenial mengidentifikasi beberapa problem utama, yaitu dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang masih mengakar, keterbatasan anggaran operasional lembaga swasta, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi ganda (agama dan sains), serta minimnya riset dan pengembangan di lingkungan lembaga pendidikan Islam. (Nur et al., 2024)

Perlu digarisbawahi bahwa dari 19 sumber yang direview, hanya 4 sumber (kategori K5) yang secara eksplisit mengangkat dikotomi ilmu sebagai tema sentral. Jumlah tersebut relatif terbatas dibandingkan keseluruhan korpus literatur, sehingga simpulan bahwa dikotomi ilmu merupakan problem utama pendidikan Islam sebaiknya dibaca sebagai kecenderungan dalam literatur yang direview, bukan sebagai generalisasi definitif yang berlaku pada seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Problem dikotomi ilmu ini sesungguhnya sudah lama menjadi perhatian para pemikir pendidikan Islam. Ismail Raji al-Faruqi jauh sebelumnya sudah menyerukan Islamisasi Ilmu sebagai solusi atas dikotomi ini, namun pelaksanaannya di tingkat kelembagaan masih jauh dari memuaskan. Yang terjadi di banyak madrasah adalah dualisme kurikulum, pagi hari belajar matematika dan IPA dengan kurikulum Kemendikbud, sore atau malam hari mengaji kitab kuning. Dua dunia yang berjalan secara paralel tanpa titik temu yang bermakna.

Kajian Ahsan (2024) tentang kontroversi kurikulum pesantren menemukan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi keilmuan Islam yang autentik dengan merespons kebutuhan modernisasi yang tidak bisa diabaikan. (Ahsan, 2024) Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan solusi instan. Dibutuhkan refleksi mendalam, dialog terbuka, dan keberanian kelembagaan untuk bereksperimen dengan model-model pendidikan yang lebih integratif.

Salah satu perkembangan positif yang teridentifikasi dalam kajian ini adalah semakin banyaknya lembaga pendidikan Islam yang menyadari urgensi persoalan tersebut dan mengambil

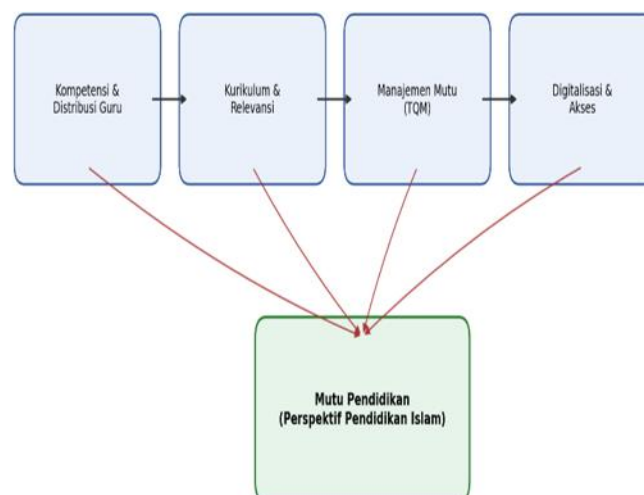
langkah-langkah konkret. Beberapa pesantren terkemuka telah berhasil mengintegrasikan kurikulum sains modern dengan kurikulum keagamaan klasik tanpa kehilangan identitasnya. Model-model ini perlu didokumentasikan, dikaji secara ilmiah, dan disebarluaskan sebagai praktik terbaik yang dapat diadaptasi oleh lembaga-lembaga lain.

Analisis Sintetis (Memahami Interkoneksi Problem)

Setelah menelaah berbagai problem secara terpisah, penting untuk memahami bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait dalam sebuah sistem yang kompleks. Kompetensi guru yang rendah, misalnya, tidak bisa dipisahkan dari persoalan kesejahteraan guru yang tidak memadai dan ini berkaitan langsung dengan alokasi anggaran pendidikan dan prioritas kebijakan. Kesenjangan akses di daerah 3T berkaitan erat dengan ketimpangan distribusi guru berkualitas, yang pada gilirannya berdampak pada implementasi kurikulum dan kualitas manajemen sekolah.

Kajian literatur tentang tantangan pendidikan di era modern yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah WUNY (2025) mengidentifikasi kelima isu yang telah dibahas di atas yang meliputi kesenjangan akses dan kualitas, ketimpangan digitalisasi, kurikulum yang tidak relevan, kompetensi guru yang belum optimal, dan lemahnya implementasi kebijakan sebagai isu-isu yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. (Arbiyanta, 2025) Ini adalah pengamatan yang sangat penting karena menunjukkan bahwa solusi parsial yang hanya menyentuh satu dimensi tidak akan efektif. Yang dibutuhkan adalah pendekatan sistemik yang bisa menyentuh beberapa dimensi sekaligus.

Untuk memperjelas keterkaitan antardimensi tersebut, Gambar 2 menyajikan kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana kompetensi guru, kurikulum, manajemen mutu, dan digitalisasi saling memengaruhi dan secara bersama-sama membentuk mutu pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Kerangka ini menegaskan bahwa intervensi pada satu dimensi cenderung memberikan dampak terbatas apabila tidak diiringi penguatan pada dimensi-dimensi lainnya.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Keterkaitan Antardimensi Mutu Pendidikan

Dalam kerangka teori sistem, setiap elemen dalam sistem pendidikan meliputi guru, kurikulum, manajemen, infrastruktur, kebijakan, adalah subsistem yang saling berpengaruh. Melemahnya satu subsistem akan berdampak pada subsistem lainnya. Sebaliknya, penguatan pada satu titik strategis bisa menciptakan efek domino yang positif. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan diagnosis yang tepat tentang titik-titik kritis mana yang perlu diprioritaskan berdasarkan konteks masing-masing satuan pendidikan.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa implikasi praktis dapat dirumuskan untuk berbagai tingkatan pemangku kepentingan pendidikan. Pada tingkat kebijakan, Pemerintah perlu memastikan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pendidikan, termasuk dalam hal kurikulum. Perubahan kurikulum sebaiknya dilakukan berdasarkan kajian empiris yang mendalam, bukan semata-mata karena pergantian kepemimpinan. Selain itu, insentif yang memadai bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil perlu diperkuat, bukan hanya dalam bentuk tunjangan finansial, tetapi juga pengembangan karir dan fasilitas profesional yang menarik.

Pada tingkat lembaga Pendidikan, perlu mengadopsi prinsip-prinsip manajemen mutu secara lebih serius. Implementasi TQM tidak harus dimulai dengan sistem yang rumit, yang terpenting adalah membangun budaya evaluasi diri yang jujur dan komitmen untuk terus memperbaiki proses pembelajaran. Kepala sekolah atau pimpinan pesantren perlu mengambil peran sebagai pemimpin perubahan yang tidak hanya menjaga status quo, tetapi aktif mencari dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik.

Untuk Guru, pengembangan profesional guru tidak boleh bersifat seremonial atau sekadar menghadiri pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Yang dibutuhkan adalah pengembangan profesional yang berkelanjutan, berbasis kebutuhan nyata di kelas, dan terkoneksi langsung dengan peningkatan praktik pembelajaran. Program *peer learning* dan komunitas belajar guru (*professional learning community*) perlu diperkuat sebagai wahana pengembangan yang lebih organik dan kontekstual.

Khusus untuk Lembaga Pendidikan Islam, Islam perlu lebih berani melakukan inovasi kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kompetensi abad ke-21 secara organik. Dikotomi ilmu perlu diatasi bukan dengan membuang salah satu, melainkan dengan menemukan jembatan epistemologis yang kuat antara keduanya. Pengembangan guru yang memiliki kompetensi ganda, menguasai ilmu keagamaan sekaligus keilmuan kontemporer perlu menjadi prioritas dalam sistem rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa problem mutu pendidikan di Indonesia, mencakup kompetensi dan distribusi guru, kesenjangan akses dan infrastruktur, kurikulum yang lambat beradaptasi, lemahnya implementasi manajemen mutu, serta ketimpangan digitalisasi, merupakan komponen-komponen yang saling terkait dalam satu sistem, bukan persoalan yang berdiri sendiri. Dalam konteks pendidikan Islam, kelima problem tersebut memiliki lapisan tambahan berupa dikotomi ilmu, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan tantangan menyeimbangkan tradisi keilmuan dengan tuntutan modernitas.

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada sintesis sistemik yang menghubungkan kelima problem tersebut ke dalam satu kerangka pemahaman yang belum banyak diuraikan secara eksplisit oleh penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung membahas isu-isu tersebut secara parsial. Dengan mengintegrasikan perspektif pendidikan Islam secara menyeluruh, artikel ini menawarkan pembacaan yang lebih utuh mengenai bagaimana problem struktural dan problem yang spesifik pada lembaga pendidikan Islam saling memperkuat satu sama lain.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, sumber literatur terbatas pada basis data Google Scholar, SINTA, dan DOAJ sehingga belum mencakup basis data internasional seperti Scopus atau Web of Science. Kedua, sebagai penelitian kepustakaan, kesimpulan yang dihasilkan sepenuhnya bergantung pada literatur yang tersedia dan dapat diakses selama periode pencarian, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya studi relevan

yang belum tercakup. Ketiga, sebagian data yang direview bersifat deskriptif sehingga sintesis kritis terhadap efektivitas intervensi tertentu, misalnya perubahan kurikulum, masih memerlukan dukungan data empiris tambahan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan diarahkan secara lebih spesifik, misalnya penelitian empiris mengenai implementasi TQM di madrasah menggunakan pendekatan studi kasus, meta-analisis kuantitatif mengenai hubungan antara distribusi guru dan capaian belajar siswa di wilayah 3T, studi komparatif antarwilayah mengenai efektivitas berbagai kurikulum, serta evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan madrasah.

Secara teoretis, kajian ini memperkuat relevansi pendekatan TQM sebagai kerangka analisis mutu pendidikan yang dapat diintegrasikan dengan nilai pendidikan Islam, sekaligus membuka ruang pengembangan model manajemen mutu yang mengakomodasi dimensi spiritual dan sosial sebagaimana ditekankan dalam perspektif pendidikan Islam. Harapannya, artikel ini dapat menjadi pijakan konseptual bagi penelitian-penelitian berikutnya yang lebih spesifik dan empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M., Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6, 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahsan, M. N. (2024). Kontroversi Kurikulum Pesantren dan Tantangan dalam Membangun Standar Mutu Pendidikan: Menemukan Keseimbangan antara Tradisi dan Modernisasi. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 5(1), 49–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jawda.v5i1.2024.22691>
- Ananda, R., Yuliani, C. E., Misnati, K., Azzikra, R., & Rahmadiyah, P. (2025). Analisis Kesenjangan Layanan Pendidikan Sekolah Dasar antara Sekolah Perkotaan dan Daerah 3T di Indonesia. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02).
- Arbiyanta, I. (2025). Tantangan Pendidikan di Era Modern : Kajian Isu Strategis dan Implikasinya bagi Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 7(2), 98–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1.85282>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html?utm_source=chatgpt.com
- Chyquitita, T. (2024). Meningkatkan Kualitas Pengajaran: Menyikapi Tantangan Profesionalisme Guru di Masa Kini. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.55904/nautical.v3i3.1309>
- Firman, A. J., & Ni, U. (2023). Critical analysis of the problems of Islamic education in the era of disruption. *Attarbiyah: Journal of Islamic Culture and Education*, 8(1), 73–91. <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v8i1>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Laporan AKGTK (Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan) Madrasah 2024*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (n.d.). *Kebijakan Pengembangan Mutu Pendidikan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045*.
- Khasanah, U., Riyanto, Y., & Setyowati, S. (2023). Total Quality Management (TQM) in Education : School Quality Management for Quality Educational Services at Senior High Schools. *SAR Journal*, 6(3), 211–216. <https://doi.org/10.18421/SAR63>
- Kompasiana. (2025). *Ketimpangan Akses Pendidikan: Ribuan Anak di Desa Pedalaman Indonesia Belum Mengenyam Sekolah*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/>
- Nur, T., Nur, M. J., Salsanabila, Z., Islam, U., Dahlan, A., Bulukmba, U. M., & Nur, D. (2024). TANTANGAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA. *Dahzain Nur*,

14(1).

- Purnasari, P. D., Sadewo, Y. D., Santosa, D. S. S., & Sanoto, H. (2024). Analisis Digitalisasi Pembelajaran Sekolah Dasar Wilayah Perbatasan. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 14(2), 198–205.
- Rokhmiyati, S. (2018). KONSEP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KELEMBAGAAN ISLAM. *Interdisciplinary Journal of Communication*, 3(2), 231–252.
- Saifu, B. (2024). Pendidikan Islam di Era Digital: Integrasi Nilai Klasik dalam Pembentukan Karakter dan Akhlak. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.70379/njis.v5i1.6184>
- Sallis, E. (2002). *Total Quality Management in Education* (3rd ed). Kogan Page.
- Setyaningsri, I., Rusijono, R., & Dewi, U. (2026). Systematic Literature Review tentang Pendekatan Diferensiasi Berbantuan Media Digital Interaktif dalam Meningkatkan Motivasi Belajar dan Keterampilan Menulis Ilmiah Siswa SD. *JagoMIPA: Jurnal Pendidikan Matematika Dan IPA*, 6, 784–796. <https://doi.org/10.53299/jagomipa.v6i2.4343>
- Syawalna, A. W., Efendi, A. L., Nurlaeli, A., Rahmawati, D., Mahazein, D. A., Khafshah, F. Z., & Supriyanto, A. (2023). Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam Meningkatkan Mutu pada Satuan Pendidikan TK (Studi Kasus di TK Al-Huda Malang). *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 3(9), 814–824. <https://doi.org/10.17977/um065v3i92023p814-824>
- Yaqin, L. N., Nugraha, R. A., & Fadhilah, N. A. (2026). Transformasi Pendidikan Digital dan Reproduksi Ketimpangan Sosial : Studi Empiris di Indonesia. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 27–35.
- Zahra, C. (2022). Pelaksanaan Hidden Curriculum Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa MAN 9 Jakarta Timur. In *Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.